

MEMBERDAYAKAN KEMBALI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI OLEH Bayquni, S,Sos, M,Pd,

Abstract

By communication human can live their life. communication human can socialization. By human can make and develop their culture. But, by that kind of communication. can we do professional, when Department. of Communication as cm intermediate scholar and this field can be accomplish by another subject of science? Do curriculum of Communication Department over a barrel or its own and what is the weakness of curriculum that applied in Communication Department? This paper tried to explain the content of curriculum indeed by Communication Department.

Keyword : Curriculum, Communication.

A.PENDAHULUAN

Dalam era informasi sekarang ini sudah selayaknya negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia terus berupaya meningkatkan kemampuannya terutama di sektor sumber daya manusia sehingga kelak diharapkan dapat menguasai teknik-teknik industri, khususnya industri komunikasi dan informasi, di samping bidang-bidang lainnya. Semuanya itu diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat dan bangsa yang kelak dapat berdiri di atas kaki sendiri tanpa menggantungkan diri pada bangsa lain.

Peningkatan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi memang perlu dipersiapkan secara berencana dan terarah, khususnya dalam menghadapi atau mengantisipasi kawasan perdagangan bebas Asia (Asian Free Trade Association) yang sedang berlangsung dan era perdagangan global / bebas(Asia Pacific Economic Cooperation) yang akan diberlakukan bagi negara-negara berkembang pada tahun 2020.

Untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan peranan perguruan/ pendidikan tinggi di Indonesia, baik yang berstatus swasta maupun negeri. Perguruan tinggi, khususnya pendidikan komunikasi dalam pengertian luas, tidak saja bermanfaat dalam mencerdaskan bangsa juga sangat berpengaruh terhadap hubungan antar manusia, bangsa dan negara yang memiliki aneka ragam budaya. Di Indonesia, dengan jumlah penduduknya 201.537.838 jiwa diperkirakan akan terdapat 22,78 juta remaja yang berada pada tingkat pendidikan usia 19-24 tahun (1995) serta 25,65 juta(tahun 2000). Sekarang baru terdapat 2337 perguruan tinggi strata satu yang berstatus swasta dengan jumlah 1.210.574 mahasiswa. Jumlah populasi mahasiswa diperkirakan akan meningkat dan diproyeksikan pada akhir Pembangunan Lima Tahun VI menjadi 2.348 juta dan 3.01 juta mahasiswa di akhir pembangunan Lima Tahun VII pada tahun 2005.¹

¹ Subangun, Emmanuel, Membangun Ilmu Komunikasi dan Sosiologi (Yogyakarta: UNIKA Atma Jaya, 1999), h. 184

Berhubung jumlah populasi mahasiswa di Indonesia yang diproyeksikan pada sektor dunia kerja diperkirakan akan makin meningkat, khususnya populasi mahasiswa dari perguruan tinggi swasta peserta program studi starta satu, maka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, telah merencanakan untuk memperluas kapasitas tampung dari program-program studi yang telah ada, disamping membuka program studi / jurusan / fakultas baru, khususnya di lingkungan perguruan tinggi swasta.

Apabila dibandingkan dengan jumlah pendidikan tinggi di atas maka pendidikan tinggi komunikasi yang ada sekarang belum seberapa jumlahnya. Di Indonesia baru terdapat kurang lebih 43 pendidikan / studi komunikasi strata satu yang meliputi program studi/konsentrasi hubungan masyarakat, jurnalistik, penerangan dan periklanan, di samping pendidikan komunikasi setingkat akademi (diploma).²

Sebagai suatu institusi pendidikan tinggi yang berkiprah untuk mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dibidang komunikasi, *outputnya* mungkin tidak dapat dihitung dengan angka secara matematika serta relatif sekali. Lebih-lebih parameter terhadap tingginya hasil pengabdian suatu pendidikan tinggi berbeda-beda sesuai dengan situasi serta kondisi masing-masing lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan. Minimal dapat dilihat dari sudut fisiknya, anatar lain sarana fisik lembaga, jumlah mahasiswa dan lulusan yang mearuh minat serta kepercayaan terhadap perguruan tinggi tersebut.³

Tafsiran tersebut sejalan dengan pemikiran Taylor dan Alexander yang dikutip dalam buku Manajemen Belajar di Perguruan tinggi yang menyatakan” *the total effort of the school to bring about desired outcomes in school and out of school situations*”.Hal ini dapat diartikan bahwa kurikulum perguruan tinggi mencakup semua kegiatan, pengalaman dan pelajaran yang tidak semata-mata dibatasi dalam lingkungan kampus, tetapi juga mencakup luar kampus.⁴

Merujuk pada hal tersebut yang sering menjadi pertanyaan adalah, apakah kurikulum Program studi komunikasi pada Fakultas Ilmu Komunikasi di Indonesia telah sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan praktis dikalangan masyarakat pengguna (user) tidak bisa menutup mata, di satu pihak, semua sektor baik itu pemerintah maupun swasta membutuhkan informasi, membutuhkan komunikasi. Meskipun, selanjutnya terbentur dengan minimnya SDM untuk menyelenggarakan pendidikan.⁵Hal ini dapat terlihat jelas pada kasus berikut ini. Seperti, terpampangnya iklan lowongan kerja pada salah satu harian, yang menawarkan pekerjaan sebagai seorang humas telah menggugah beberapa lulusan sarjana ilmu komunikasi untuk melamarnya dengan kriteria memahami tentang ketanaga kerjaan dan paham tentang perekrutan pegawai. Menyebabkan kekecewaan para sarjana, dengan kesimpulan bahwa pekerjaan itu hanya cocok buat para lulusan sarjana hukum yang mempelajari tentang hukum ketanagakerjaan dan para sarjana psikologi yang memahami tentang tehnik pembuatan ujian seleksi pegawai baru atau psikotes. Cerita ini memberikan gambaran bahwa masih belum semua masyarakat memahami apa itu humas sebagai profesi ataupun sebagai kajian ilmu di perguruan tinggi.

Salah satu program studi yang juga harus menjawab beberapa tantangan persoalan diatas adalah komunikasi yang merupakan cabang dari Ilmu Komunikasi. Apalagi Ilmu

²Ibid, h. 184

³Ibid, h 188

⁴Hamalik, Oemar, Manajemen Belajar Di Perguruan Tinggi (Bandung :Sinar Baru 1991) h.4

⁵ Subangun, loc .cit.

Komunikasi menurut Severin-Takard (1998) di dalam bukunya *Communication Theories, origin, methode & Uses* menyatakan bahwa, ilmu komunikasi memiliki ciri –ciri “ ***is apart of skill, part of art and part of science***,⁶ yang menimbulkan pilihan sikap . Di satu sisi komunikasi dipandang hanya sebagai instrumen (dari suatu kepentingan yang lebih besar) di sisi lain komunikasi berdiri sebagai sebuah fenomena diskursus yang mampu secara konseptual dan praksis menjawab problematika masyarakat.

Jika akhirnya sampai pembicaraan pada level empiris, yaitu kurikulum Ilmu Komunikasi yang lebih terkonsentrasi pada program studi komunikasi, maka setidaknya, dengan melihat uraian diatas. Bagaimana kurikulum Ilmu komunikasi yang terkonsentrasi pada Program studi komunikasi menjawab kritik dan tantangannya. Sudahkah Ilmu Komunikasi mengambil sikap dalam kurikulum Program studi Komunikasinya, khususnya terhadap problematika dan tantangan kemasyarakatan ? .

Ada beberapa hal yang mungkin dapat digunakan untuk menjelaskan pertanyaan diatas, yang juga merupakan pertanyaan yang perlu di jawab. **Pertama**, kendala struktural dalam penentuan kurikulum Program studi komunikasi dengan 60-80 % pembagian bobot kurikulum program kejuruan dan umum yang ditentukan oleh pemerintah, perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar pada umumnya. Sehingga para lulusan dapat lebih fleksibel dan cukup responsif menghadapi dinamika masyarakat. **Kedua**, minimnya pengetahuan pengajar akan pengetahuan mengenai penerapan kurikulum Program studi komunikasi, menjadikan suatu dilema tersendiri dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan relevansi kebutuhan pasar, mengakibatkan kecenderungan pada pilihan yang sangat pragmatis semisal pendidikan profesi menjadi kurang terarah. **Ketiga** , problem konsep pendidikan S-1 (khususnya Ilmu komunikasi) di Indonesia sifatnya tanggung (setengah-setengah), lebih menekankan pada satu aspek program pembelajaran sebagai wujud pengejawantahan dari kurikulum seperti pemberian materi (ceramah) dibanding secara menyeluruh. **Keempat** , pragmatisme pasar, yaitu sebagian dari masyarakat yang hanya berorientasi pada gelar dan bukan profesionalisme dunia kerja tersebut, disisi yang lain antara dunia pendidikan dan kalangan praktisi bisnis masih cukup ada jarak dialog dalam kerangka pengembangan kurikulum Program studi komunikasi yang secara umum menjadi pengembangan wawasan masyarakat akan komunikasi.⁷

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas.Prof.Dr Moestopo (Beragama) yang disingkat FIKOM UPDM(B) adalah salah satu Fakultas Ilmu Komunikasi di Jakarta, menurut pengamatan awal peneliti program pembelajaran yang dilakukan telah disesuaikan dengan karakter tujuan pembelajaran. Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional No. 001/BAN-PT/AK-1/VIII/1998 FIKOM UPDM(B) Terakreditasi, dinyatakan memiliki tujuan untuk menjadikan sarjana lulusan FIKOM UPDM(B) sebagai sarjana yang profesional, beriman dan bertaqwa, serta diharapkan mampu bersaing dengan menerapkan sistem kredit semester.⁸

Agar hasil pendidikan dapat memenuhi perubahan pembangunan , siap bekerja dan siap berkompetisi. Maka nilai kredit untuk penyelenggaraan kuliah dibagi dalam beberapa tahapan kurikulum program pendidikan.Untuk penyelenggaraan perkuliahan satu SKS ditentukan berdasarkan kegiatan yang meliputi tiga macam aktivitas dalam satu minggu selama satu semester, yaitu

- 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal, misalnya dalam bentuk kuliah.

⁶ Subangun, op. cit., h.211

⁷ Subangun,Emanuel, Membangun Ilmu Komunikasi dan Sosiologi (Yogyakarta: UNIKA Atma Jaya, 1999), lb.id . h, 211

⁸ Panduan Pendidikan Tahun 2002-2003, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Prof. Dr Moestopo (Beragama) Jakarta, FIKOM UPDM (B) h. 2

- 60 menit kegiatan akademis terstruktur yaitu kegiatan sudi tidak terjadwal , tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya menyelesaikan tugas di rumah atau di perpustakaan
- 60 menit kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk mendalami, mempersiapkan tugas akademik secara mandiri, misalnya membaca buku acuan (literatur)⁹

• Bila melihat beban S1 Fakultas Ilmu Komunikasi UPDM(B) yang terdiri dari 8 semester dengan beban studi 150 Satuan Kredit Semester (SKS) dengan perincian: Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) 10 SKS, Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) 36 SKS, Mata Kuliah Keahlian Komunikasi (MKKK) 75 SKS, Mata Kuliah Konsentrasi Komunikasi sebesar 23 SKS dan Mata Kuliah Pilihan Komunikasi (MKPK) 6 SKS. Maka dengan beban sebesar 23 SKS untuk Program studi komunikasi tersebut timbul pertanyaan, sudah sesuaikah kurikulum Program studi komunikasi yang diterapkan Fakultas Ilmu Komunikasi Univ. Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dalam memenuhi tuntutan profesionalisme kerja yang dihadapi.

Bertitik tolak dari pembangunan pemerintah yang sangat membutuhkan partisipasi masyarakat, sehingga dibutuhkanlah tenaga-tenaga ahli dibidang informasi dan komunikasi yang mampu menciptakan hubungan harmonis antara para insan pembangunan, sehingga menyebabkan didirikannya Fakultas Publisistik UPDM(B) dengan jurusan Hubungan Masyarakat, pada tahun 31 Desember 1964 ¹⁰. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan pendidikan untuk menghasilkan sarjana strata satu (S1) Ilmu Komunikasi dengan Program studi komunikasi yang memiliki kemampuan akademik dan / atau profesional dalam menerapkan, mengembangkan Ilmu Komunikasi sebagai wacana meningkatkan taraf hidup mahasiswa dan memperkaya khasanah pengetahuan masyarakat tentang komunikasi Program Studi komunikasi FIKOM UPDM(B) memiliki kualifikasi sebagai berikut :¹¹

- a. Memiliki kecakapan pengetahuan komunikasi terapan bidang Hubungan masyarakat ;
- b. Memiliki kemampuan menganalisis, merencanakan dan mengelola aktivitas komunikasi pada bidang komunikasi;
- c. Memiliki wawasan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan industri komunikasi.
- d. Memiliki kemampuan untuk bekerja / membuka lapangan pekerjaan dibidang komunikasi berdasarkan konsep keilmuannya;

B. PEMBAHASAN

Arti istilah kesesuaian dalam dunia pendidikan adalah suatu keadaan yang menyatakan tentang hubungan program-program yang dikembangkan , dibina dan dilaksanakan dalam sitem pendidikan nasional sehingga dapat menghasilkan keluaran pendidikan yang mampu

⁹ Ib id h.4

¹⁰ Sejarah berdiri dan Berkembangnya Yayasan Univ. Prof. Dr. Moestopo (Jakarta edisi kesembilan 2003) h.79

¹¹ Buku panduan, Fakultas Ilmu Komunikasi (Univ.Prof.Dr.Moestopo(Beragama) Jakarta),h.ii

memenuhi tuntutan para pemakai lulusan baik dari segi jenis, jumlah, kualifikasi maupun waktu yang dipersyaratkan¹²

Munculnya pengertian diatas didasari oleh perspektif yang dikemukakan oleh Sutojo Tjokrodiharjo,yaitu:¹³ perspektif 1)tempat, 2) waktu dan 3) arah pendidikan.

1. Perspektif tempat, berdasarkan perspektif ini pengertian diatas diarahkan untuk mengkaitkan tuntutan kebutuhan pembangunan yang didasarkan lokal, regional, nasional dan global. Hal ini bertujuan agar lulusan dan peserta didik mampu memiliki kompetensi untuk mengembangkan kehidupannya secara fungsional baik sebagai pribadi anggota masyarakat maupun warga negara

2. Perspektif waktu, menurut pandangan perspektif ini maka pengertian diatas diarahkan untuk menjawab tantangan masa kini dan mengantisipasi masa yang akan datang dalam perubahan yang berlangsung amat cepat dan pesat. Perubahan yang terjadi ada dua kecenderungan yaitu a)terjadinya transformasi masyarakat yaitu dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri yang syarat dengan perubahan fisik,pranata sosial maupun sistem nilai yang ada, b) adanya proses globalisasi yang semakin masif dalam aspek kehidupan.

3. Perspektif arah pendidikan, pengertian diatas diarahkan pada pemahaman bahwa sesungguhnya bukan hanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau keterampilan semata melainkan juga mencakup mengenai wawasan, nilai, sikap dan mentalitas serta perilaku yang diperlukan dalam kehidupan lingkungan masyarakat.

Mengacu pada pengertian diatas inilah, maka bila kita melakukan kesesuaian maka logikanya terdapat keadaan yang menyatakan tentang hubungan program-program yang dikembangkan, dibina dan dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional sehingga dapat menghasilkan keluaran pendidikan yang mampu memenuhi tuntutan para pemakai lulusan .Dalam penelitian ini yang menjadi pusat perhatian penulis adalah mencari kesesuaian kurikulum program studi kehumasan dengan tuntutan profesionalisme pekerjaan.

Pernyataan tersebut di dukung pula dengan pendapat dari Nana Sy.Sukmadinata yang dikutip dari buku belajar pembelajaran karangan Dimiyati dan Mudjiono yang menyatakan bahwa kesesuaian itu berarti keterpaduan antara komponen tujuan,isi,pengalaman belajar,organisasi dan evaluasi pada kurikulum dengan kebutuhan masyarakat baik dalam pemenuhan tenaga kerja maupun kurikulum yang diidealkan.¹⁴

B. KURIKULUM

1. Pengertian Kurikulum

Kurikulum menurut B.Othanel Smith.W.Stanle dan J.Herlan Shares yang dikutip dalam buku Teras Kuliah Belajar Mengajar aktif diartikan sebagai sejumlah pengalaman yang secara potensial dapat diberikan kepada mahasiswa, yang diperlukan agar mereka dapat berpikir dan bertindak laku sesuai dengan masyarakat.¹⁵

Begitu pula dengan yang dinyatakan dalam buku Curriculum karangan John D McNail , mengemukakan bahwa kurikulum dibuat pada semua bidang studi ,untuk memungkinkan mahasiswa menyelesaikan persolan-persoalan mereka sesuai dengan maksud dan tujuannya.¹⁶

¹²Subangun,Emanuel, membangun ilmu komunikasi dan sosiologi (Yogyakarta;FakultasIlmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas. Atma Jaya) h.156

¹³ Tjokrodiharjo,Sutojo"*Esensi dan Tantangan pelaksanaan sistem belajar peserta didik aktif di Perguruan Tinggi*", dikutip langsung oleh Emanuel Subangun, *Membangun Ilmu Komunikasi dan Sosiologi* (Yogyakarta,Univ Atma Jaya, 1999), h. 157

¹⁴ Dimiyati,Mujiono, Belajar & Pembelajaran (Jakarta, Rineka Cipta, 2002) h, 264

¹⁵ Masrial , Teras Kuliah Belajar Mengajar aktif hal 126

Oleh Franklin Bobbitt, hal tersebut diperjelas lagi dengan pernyataan yang menyatakan bahwa, kurikulum memberikan pengalaman belajar tersendiri dalam mencapai target yang dituju, dan bukan semata-mata sebagai studi akademis.¹⁷

Menurut Edward King dalam bukunya " *Curriculum Panning*", beliau mengemukakan bahwa kurikulum adalah cara pembelajaran yang dipakai oleh kampus untuk memberikan kesempatan bagi pengalaman mahasiswa yang menuntut kepada pelajaran yang diinginkan. Dalam pandangan ini, kurikulum diartikan sebagai keseluruhan pembelajaran, bimbingan penyuluhan dan sebagainya, yang termasuk dalam program kampus secara menyeluruh.¹⁸

Pernyataan Edward King didukung oleh Bergquist, Philips and Quehls dalam deskripsinya tentang faculty development close parallels Gaff's model yang menyatakan bahwa kurikulum dapat berkaitan dengan pengembangan keilmiah pola mengajar dosen, pembuatan perangkat materi pembelajaran yang baru, serta dapat pula dihubungkan dengan pengembangan pola komunikasi dan organisasi. Dengan demikian kurikulum itu adalah suatu sarana yang digunakan fakultas untuk pengembangan aktivitas akademis yang paling luas.¹⁹

Suatu kurikulum yang diberikan kepada mahasiswa, haruslah memiliki pengalaman belajar sesuai, yang oleh Ralph Tyler ditunjukkan dalam lima prinsip umum pengalaman belajar; (1) harus sesuai dengan praktek, oleh Tyler diartikan bahwa kurikulum yang diberikan kepada mahasiswa haruslah sesuai dan seobjektive mungkin dengan kenyataan di lapangan, serta memberikan peluang kepada mahasiswa dalam menyelesaikan persoalan. (2) Kepuasan, diartikan bahwa kurikulum mampu memberikan kepuasan terhadap kemampuan kognitif yang mampu menjamin mahasiswa seperti apa yang seharusnya diinginkan atau ahli pada bidangnya. (3) Keberhasilan, diartikan disini bahwa kurikulum memberikan latar belakang pengalaman bagi mahasiswa dalam menjalankan aktifitas profesi, sehingga mahasiswa mampu meramalkan sejauh apa tingkat keberhasilan tersebut dicapai. (4) Pendekatan multiple, dinyatakan bahwa banyak aktivitas yang dapat dilakukan dengan memiliki kesamaan maksud dan tujuan, sedangkan kurikulum dapat membantu menjawab cara melakukan aktivitas itu sehingga mahasiswa dapat menentukan apa yang terjadi atau akan dilakukan dari aktivitasnya tersebut. (5) Multiple Outcomes, menyatakan bahwa setiap mahasiswa, merasakan bahwa akan ada suatu hasil dari setiap aktivitas pembelajaran, karena itu mahasiswa harus memiliki interpretasi sendiri serta menerapkan gagasan dari dalam kelas pun dengan caranya sendiri, tergantung sejauh mana pengalaman utama mereka, dan kurikulum menjadi pemandu dalam menyusun aktivitas belajar tersebut, yang dapat berperan untuk berbagai hasil yang diinginkan.²⁰

Dalam buku *Designing and Improving Courses and Curricula in Higher Education* dinyatakan bahwa, Kurikulum itu dirancang, diterapkan dan di evaluasi secara lengkap dapat dilihat melalui beberapa hal yaitu (1) Kepekaan akademis dalam menyusun program pembelajaran (2) Kesadaran, kemampuan, ketertarikan dan prioritas dari mahasiswa terhadap program pembelajaran yang diberikan kepadanya (3) Pengetahuan dan penghargaan terhadap kedisiplinan (4) Pemahaman menyangkut sumberdaya dan pilihan yang disediakan fakultas untuk sumberdaya tersebut. (5) Pemahaman mengenai tujuan yang ingin dicapai dari materi pembelajaran yang diperlukan oleh semua mahasiswa tanpa memperhatikan mata pelajaran pokok dan tujuan jangka panjang mahasiswa.²¹

Dalam sebuah situs Mailis Rand, menyatakan bahwa kurikulum adalah sumber pembelajaran yang menentukan sasaran hasil pembelajaran, periode standard pembelajaran dan tingkat standar pembelajaran, serta menjadikan garis besar dalam menyusun pokok-pokok pikiran pembelajaran, baik berkaitan dengan kebutuhan pembelajaran, kondisi pembelajaran maupun yang berkaitan penyelesaian pembelajaran.²²

Kurikulum itu pun diterjemahkan dalam suatu tahapan pembelajaran yang berbentuk studi akademis yang lebih efektif dalam suatu format, face to face work experience, kerja praktek dan tugas mandiri. seperti : 1) Face-To-Face work experience dapat pula dilaksanakan dalam wujud suatu ceramah kuliah, seminar atau dalam format yang lain yang ditetapkan oleh institusi yang terkait untuk mencapai sasaran pembelajaran. 2) Praktek kerja akan mencapai sasaran pembelajaran dengan memfokuskan pada ketrampilan dan pengetahuan yang diperoleh di dalam praktek. Praktek kerja dilaksanakan dalam lingkungan pelatihan dan dalam wujud praktikum, pelajaran praktis, serta sesi laboratorium atau dalam format yang lain yang ditetapkan oleh institusi bidang pendidikan itu. Untuk kepentingan Peraktikum ini, pelatih praktek kerja adalah pekerjaan praktis yang berada di lingkungan kerja di bawah pengawasan seorang supervisor. 3) Tugas mandiri adalah aktivitas mandiri yang dilakukan mahasiswa untuk mencapai sasaran pembelajaran.²³

Dalam pengertian kurikulum yang telah penulis uraikan diatas tersirat adanya tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum atau tujuan bidang studi menggambarkan bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berhubungan dengan bidang studi dalam kurikulum universitas. Setiap bidang studi mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda dengan bidang studi lain. Tujuan ini menjadi acuan dari bentuk-bentuk pengalaman belajar yang dicapai siswa setelah mempelajari bidang studi tersebut pada jenjang pendidikan tertentu.

16 McNail, D., John Curriculum, A Comprehensive Introduction, Harper Collins College Publisher, University Of California Los Angeles 1996 h. 397

17 Ibid, h 417

18 Ahmadi, Abu, pengantar metode didaktik (Bandung, armico) h, 159

19 Eble, E Kenneth, McKeachie, J, Wilbert, *Improving Undergraduate Education Trough Faculty Development* (San Francisco London 1986 Jossey Bass Publishers) h.12

20 Op cit, h 149-153

21 Diamond, M, Robert *Designing and Improving Courses and Curricula in Higher Education* (San Francisco California, Jossey Bass Inc 1989), h 5-6

22 http://www.ekak.archimedes.ee/Korgharidusstandard_inglise_keeles.htm

23 Ib id. <http://www.ekak.archimedes.ee/>

Tujuan sebagai sebuah komponen kurikulum merupakan kekuatan fundamental yang peka sekali, karena hasil kurikulum yang diinginkan tidak hanya sangat mempengaruhi bentuk kurikulum, tetapi memberikan arah dan fokus untuk keseluruhan program pendidikan. Karena tidak ada satu aspek pendidikan yang bertentangan dengan tujuan. Dalam kenyataannya, aspek-aspek pendidikan selalu mempertanyakan tentang tujuan.

Dalam buku berjudul *Curriculum A comprehensive Introduction*, karangan John D McNail, dinyatakan bahwa Tujuan dari kurikulum adalah mengembangkan pemikiran rational dari mahasiswa, memberikan pengalaman mahasiswa akan penelitian, menutupi kekurangan kemampuan, serta dapat menerapkannya dimasyarakat.²⁴

Begitu pula dengan pemahaman tujuan berikut ini, yang menyatakan bahwa tujuan kurikulum bukanlah sebatas menyusun kurikulum, tetapi bagaimana memprogram serta menyajikan apa yang menjadi kebutuhan masa depan guna memenuhi kebutuhan pembelajaran, serta memberikan pandangan yang lebih luas akan kebutuhan sumber daya manusia yang lebih baik. Kurikulum yang disusun seperti tradisi sebelumnya hanya kan berakhir dengan penerimaan materi sesuai dengan apa yang akan dan telah diajarkan atau dipelajari, dan sebuah persoalan tidak akan dicapai atau diselesaikan tanpa adanya suatu instruksi²⁵

Salah satu dari sekian banyak tujuan pendidikan adalah menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pemakai (sektor lapangan kerja). Untuk itu, masyarakat pengguna diperkenankan melakukan hubungan kerja sama dengan suatu lembaga pendidikan. Dengan demikian berbagai masukan dari masyarakat dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan-pengembangan, maupun penyusunan kurikulum pada masa berikutnya.²⁶

Tujuan kurikulum atau tujuan bidang studi harus menggambarkan bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berhubungan dengan bidang studi dalam kurikulum universitas. Setiap bidang studi mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda dengan bidang studi lain. Tujuan ini menjadi acuan dari bentuk-bentuk pengalaman belajar yang dicapai mahasiswa setelah mempelajari bidang studi tersebut pada jenjang pendidikan tertentu.

Tujuan kurikulum atau bidang studi menggambarkan bentuk tingkah laku atau kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki mahasiswa setelah proses pembelajaran. Dalam penelitian ini, tujuan kurikulum yang di maksud berlandas pada *taxonomy of education objectives*. Yaitu domein kognitif, afektif dan psikomotorik dengan penerapannya terdapat dalam tujuan segera, sedang tujuan jangka panjang tidak dibatasi karena tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui proses pendidikan jangka panjang.

Penentuan isi kurikulum tergantung kepada tingkatan pengembangan kurikulum yang dilakukan . Isi kurikulum terutama berisi mata kuliah atau bidang studi yang dapat diajarkan kepada mahasiswa

Begitu pula yang dikemukakan dalam buku yang berjudul *Curriculum* karangan John D McNeil, bahwa Isi kurikulum dinyatakan sebagai petunjuk bagi mahasiswa dalam memecahkan masalah-masalah kekinian , dan isi kurikulum pun membantu mahasiswa bagaimana memahami dunia kerja yang sangat membutuhkan banyak persepsi²⁷

Kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan isi kurikulum sebagai mana yang dikemukakan oleh Frank Bobbit yaitu:²⁸

1. Isi kurikulum harus menjelaskan analisa pengalaman manusia, seperti meliputi bahasa, kehidupan sosial, agama dan lapangan pekerjaan

²⁴ McNail,D,John *Curriculum Acomprehensive Introduction* (University Of California Los Angeles,Harper Collins Collage Publisher 1986) h, 95

²⁵ Ibid, h 144.

²⁶ Masrial,Teras Kuliah Belajar Mengajar Aktif(Padang, Angkasa Raya 1991) . h,134

²⁷ Op.cit. h 173

²⁸ Loc.cit, h 419

2. Isi kurikulum harus memuat analisa pekerjaan dari bidang pengalaman tersebut, yang tersusun secara mendalam.
3. Isi kurikulum harus memiliki sasaran hasil pendidikan, sebagai petunjuk dalam melaksanakan aktivitas
4. Isi kurikulum menjangkau tujuan yang selektif, yang bertindak sebagai basis untuk merencanakan aktivitas.
5. Perencanaan yang dilakukan secara detil disusun dalam sebuah kurikulum, akan memandu dalam melakukan aktivitas, pengalaman dan peluang yang menjadi sasaran hasil.

Penggunaan Kriteria dalam memilih isi kurikulum berdasarkan pada berbagai prinsip umum diatas, sangat membantu terutama dalam memilih mata kuliah. Dari urian diatas, maka dapat diinterpretasikan bahwa, isi kurikulum bukanlah sekedar deskripsi mata kuliah. Namun lebih dari itu, isi kurikulum juga berisi nilai pengetahuan sosial dan sikap sebagai dampak dari lingkungan sosial di kampus.

Penyempurnaan dan perubahan kurikulum harus sesuai dan bersumber dengan strategi penyempurnaan perguruan tinggi. Inti strategi penyempurnaan perguruan tinggi adalah penanganan secara berencana dan bersamaan tiga proses yang dihadapi oleh perguruan tinggi, yakni²⁹ (1) proses perubahan menuju sistem pendidikan nasional yang digariskan, (2) proses meningkatkan kemampuan untuk mencapai hasil karya yang lebih baik, dan (3) proses pertumbuhan untuk mampu menghadapi tantangan-tantangan yang meningkat setiap tahunnya.

Dasar untuk menentukan strategi penyempurnaan adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan masyarakat, yaitu kemampuan berkarya dan kemampuan untuk tumbuh memenuhi kebutuhan.
2. Sistem pendidikan sebagai alat untuk mencapai kemampuan berkarya dan kemampuan untuk tumbuh.

Inti dasar dan kebijaksanaan tersebut juga melandasi strategi pengembangan kurikulum perguruan tinggi dengan pemusatan pada komponen-komponen sebagai berikut:³⁰

1. Kebutuhan yang mendasari penyempurnaan kurikulum, yang meliputi kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pengembangan (masyarakat) dan kebutuhan subjek didik (mahasiswa). Kebutuhan iptek meliputi profesi non kependidikan dan profesi kependidikan yang masing-masing mencakup keahlian akademik dan keahlian professional. Kebutuhan pembangunan terutama ditujukan kepada aspek tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan, sedangkan kebutuhan subjek didik (mahasiswa) adalah kebutuhan yang sesuai dengan tingkat perkembangannya.
2. Sistem dan prosedur penyempurnaan kurikulum yang meliputi penyempurnaan struktur-struktur dan isi kurikulum serta penyempurnaan desain system instruksional. Prosedur penyempurnaan yang diharapkan adalah yang berdasarkan pendekatan sistemik dan pendekatan kompetensi, yang meliputi aspek atau komponen analisis tugas, identifikasi kemampuan, kebutuhan latihan pengalaman belajar, tujuan kurikulum isi paket program, kriteria keberhasilan strategi belajar mengajar, strategi bimbingan pelaksanaan kurikulum, prosedur evaluasi pengelolaan kurikulum, umpan balikan dan komponen penyesuaian dan perbaikan. Desain instruksional mencakup tujuan instruksional, perilaku awal, prosedur instruksional (tatap muka, berstruktur tak terjadwal, belajar mandiri, praktikum, seminar, kapita selekta program pengalaman lapangan) prosedur evaluasi hasil belajar dan umpan balikan. Sistem kredit semester (SKS) dan CBSA menjadi perhatian dalam komponen ini sesuai dengan ketentuan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
3. Sistem penunjang penyempurnaan kurikulum yang terdiri atas unsur fasilitas dan perlengkapan, kemampuan tenaga pengajar dan tersedianya pembiayaan pendidikan tinggi.

²⁹ Hamalik, Oemar Loc.cit h,40, h 41

³⁰ Ib.id, h 42

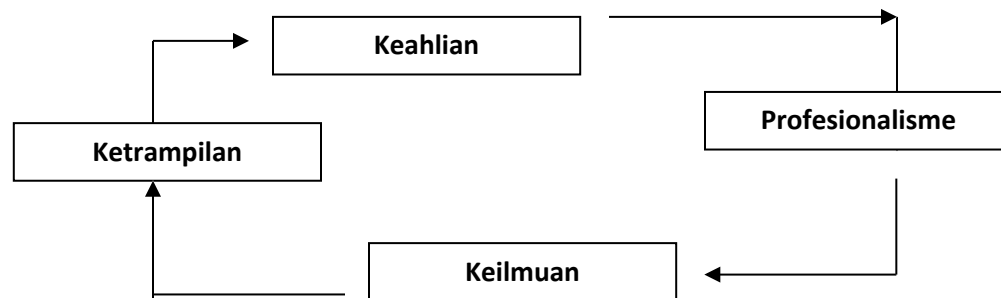
Penyempurnaan kurikulum atau perubahan kurikulum adalah usaha melakukan penyesuaian – penyesuaian yang perlu dengan cara melakukan peninjauan - peninjauan atas bagian - bagian tertentu yang bersifat tidak mendasar dari kurikulum tersebut. Bagian-bagian atau segi tertentu yang mengandung kelemahan itu disempurnakan dan dibuat lebih baik .

C. KURIKULUM PROGRAM KEHUMASAN

1. Tujuan Kurikulum

Dengan memperhatikan kondisi dunia kerja / pasar dan keinginan untuk bersikap lebih kritis di tengah dinamika masyarakat yang penuh dengan perubahan dan atau pergeseran-pergeseran di dunia dan di Indonesia pada khususnya, perlu mencermati adanya pergeseran”cepat dan Sistematis” secara terus menerus yang terjadi saat ini, dari basis pertanian- basis industri dan basis pengetahuan (teknologi-informasi). Fenomena ini menjadi menarik apabila dikaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia yang ikut pula pada pergeseran tersebut yang nampaknya terkesan tidak tuntas mengalami lompatan-lompatan dari basis ke basis, dan tanpa di dukung oleh infrastruktur yang kuat, terutama faktor manusiannya.

Maka kurikulum Ilmu komunikasi khususnya kehumasan perlu di kaji ulang dengan memperhatikan dua hal sebagai berikut : **Pertama** memahami siklus pengembangan diri³¹ yang pada umumnya dapat diamati dan diaplikasikan oleh dunia bisnis sebagai berikut :



³¹ Subangun, Emmanuel, Membangun Ilmu Komunikasi dan Sosiologi,(UNIKA Atma Jaya,Yogyakarta 1999) h. 214.

Model tersebut menggambarkan suatu siklus, bagaimana suatu ilmu perlu untuk “dibumikan” agar dapat diterapkan di lapangan. Keterampilan yang dimaksud dapat di terjemahkan tidak hanya bersifat teknis dalam pengertian keseharian saja, nampaknya, termasuk juga logika berfikir. Suatu keterampilan yang dilakukan secara berulang-ulang dan mampu dikerjakan dengan baik suatu saat dapat diklaim sebagai suatu keahlian, terutama ketika keahlian tersebut mampu dijelaskan secara lebih konseptual. Kemudian jika suatu keahlian yang dimiliki dan digeluti. Dilandasi dengan motivasi, visi-misi serta etika sebagai sebuah integritas dari orang yang ahli tersebut dan mampu membawa kebaikan secara lebih luas, yang tidak hanya sekedar pekerjaan teknis, bisa disebut sebagai seorang yang profesional.

Kedua, *kegiatan pembelajaran mestinya perlu memperhatikan konsentrasi yang lebih luas yang mendalami tidak hanya komunikasi terapan tetapi juga kajian kritis komunikasi. Hal tersebut akan mempengaruhi suatu keputusan untuk menentukan bidang konsentrasi yang sangat tergantung dengan sumber daya yang memiliki kualifikasi seperti tersebut diatas .Tiap bidang konsentrasi studi sebaiknya tidak lebih dari empat mata kuliah inti, di mana satu diantaranya adalah kuliah kerja lapangan. Angka tersebut adalah relatif , dalam arti diperoleh dari mata kuliah ini yang paling relevan dan mendasar. Sebagai contoh untuk Program studi Humas , mahasiswa cukup mengambil : Manajemen humas, humas perusahaan dan manajemen krisis ditambah dengan kuliah kerja lapangan .*

Untuk memahami ide tersebut perlu dipertimbangkan tiga hal, **pertama** adalah karakteristik / sifat mata kuliah hubungan masyarakat , yang jika dipilah harus mengandung tiga karakteristik yaitu mata kuliah teoritik, manajemen dan praktis. Yang **kedua** adalah pemahaman tentang proses yang berlangsung dalam operasional pendidikan kehumasan , yaitu mata kuliah yang memiliki muatan kognitif, afektif sampai psikomotorik seperti apa yang perlu dimiliki mahasiswa sebelum masuk ke konsentrasi studi , serta mata kuliah macam apa yang perlu diambil mahasiswa untuk memperkuat konsentrasi studinya dan meluaskan wawasannya. **Ketiga**, yang sangat penting dan mendasar , yang menjiwai ide tersebut, adalah upaya agar sistem-sistem yang dibentuk kemudian, menjadi pendidikan ke humasan menjadi lebih humanis,kritis dan professional

Adapun susunan kurikulum pada program kehumasan adalah sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	Humas
1.	Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MKP)	10 Sks
2.	Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)	51 SKS
3	Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)	63 SKS
4	Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB)	13 SKS
5	Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)	15 SKS
	Jumlah	150 SKS

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini membatasi pada program kehumasan, sehingga pada bahasan , esensi program komunikasi yang merupakan induk dari program kehumasan memiliki prosentase sedikit. Maka

berdasarkan penjabaran yang umum diatas tadi, adapun mata kuliah kehumasan yang menjadi tolak ukur kesesuaian dalam penelitian ini adalah :

a. Menulis Release

Materi kuliah mencakup pengertian, teknik pengumpulan bahan dan penulisan release untuk berbagai media

b. Perencanaan Merek dan Citra

Materi kuliah mencakup pengertian, ruang lingkup dan karakteristik merek dan Citra, teori-teori dan penerapannya dalam membangun citra merek, menciptakan, memelihara, melindungi merek agar bisa menghasilkan nilai dan citra.

c. Rethorika dan Public Speaking

Materi kuliah mencakup pengertian, ruang lingkup, karakteristik, teori-teori dan penerapannya dalam mengenali dan memahami publik, mengkomunikasikan informasi secara lebih efektif, meningkatkan kemampuan persuasif, mengembangkan, mengorganisasikan, menyusun dan menyampaikan pesan secara efektif.

d. Fotografi

Materi Kuliah mencakup pengetahuan teoritis dan praktis tentang seluk beluk penggunaan kamera dalam pengambilan gambar/objek

e. Menyusun Annual Report & Company Profile

Materi kuliah mencakup pengertian, karakteristik, dan cara menyusun dan Memanfaatkan annual report dan company profile.

f. Kapita Selekta Humas

Materi kuliah meliputi kegiatan menyeleksi, mengkaji, menganalisis dan menyimpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan kehumasan dan menyajikan implementasi/aplikasi teorinya dalam suatu bentuk kegiatan kehumasan praktis.

g. Praktek Humas (PKL)

Melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan pada instansi/ lembaga Humas (1 s.d 3 bulan)

h. Komunikasi Bisnis dan Pemasaran.

Materi kuliah mencakup pengertian (bisnis dan pemasaran), ruang lingkup, karakteristik, teori-teori dan penerapan dalam upaya membantu perencanaan, komunikasi pemasaran terpadu, mengembangkan strategi untuk memaksimalkan hasil pemasaran, mengidentifikasi pelanggan/ pasar sasaran, memilih bauran komunikasi pemasaran yang tepat, sesuai dengan anggaran tersedia.

i. Metode Penelitian Komunikasi

Materi yang dibahas mencakup jenis dan model penelitian komunikasi, kuantitatif dan kualitatif teknik-teknik penelitian komunikator, pesan, media, komunikan/khalayak, efek komunikasi dan latihan penelitian komunikasi

j. Manajemen Industri Kehumasan

Mata kuliah mencakup pengertian kehumasan sebagai sebuah industri, ruang lingkup pengelolaan, upaya dan strategi serta hubungannya dengan komponen/istitusi pendukung kegiatan humas

lk Manajemen Industri Media Cetak

Materi kuliah mencakup pengertian media cetak sebagai sebuah industri, ruang lingkup pengelolaan, upaya dan strategi, serta komponen/institusi pendukung kegiatan media yang lain.

l. Manajemen Industri Media Massa Elektronik

Materi kuliah mencakup pengertian media elektronik sebagai sebuah industri, ruang lingkup pengelolaan, upaya dan strategi, serta komponen/institusi pendukung kegiatan media elektronik

m. Manajemen Industri Periklanan

Materi kuliah mencakup pengertian eksistensi periklanan sebagai sebuah industri, ruang lingkup pengelolaan, upaya dan strategi, dalam mengelola industri periklanan dan hubungannya dengan komponen/institusi pendukung periklanan yang lain, seperti pengiklan, media, jasa riset pemasaran dan sebagainya.

n. Manajemen Isu, Krisis dan Konflik

Materi kuliah meliputi pengetahuan mengenai pengertian, karakteristik, metode pengenalan, pendekatan sistematis, sumber-sumber konflik, bentuk krisis, teknik solusi isu, krisis dan konflik, serta penerapannya dalam membangun dan memelihara citra / hubungan yang efektif.

o. Produksi Siaran Radio

Materi mencakup pengertian karakteristik, perencanaan dan strategi, serta pemrograman dan evaluasi.

p. Produksi Siaran TV

Materi kuliah mencakup pengetahuan teoritis mengenai karakteristik produksi siaran TV dan penerapannya dalam perencanaan program evaluasi.

q. Psikologi Khalayak / Konsumen

Materi kuliah mencakup pengetahuan teoritis mengenai pengertian khalayak dan konsumen dari perspektif psikologis serta proses dan mekanisme internal penerimaan dan pengolahan informasi dalam diri khalayak dan konsumen.

r. Penulisan Kreatif

Materi kuliah mencakup pengertian, karakteristik, jenis dan teknik penulisan kreatif.

s. Relationship & Keprotokolan

Materi kuliah mencakup pengetahuan praktis mengenai teknik dan etika pengelolaan berbagai acara formal, mulai dari pertemuan, Perjamuan dan pesta dalam kegiatan kemasyarakatan hingga upacara kenegaraan yang melibatkan hubungan diplomatic

Suatu jenis pekerjaan pada umumnya akan dapat dikerjakan dan diselesaikan dengan hasil yang baik di tangan orang yang memiliki kemampuan dalam bidang itu. Kemampuan ini dalam tingkatan yang paling dasar dan sederhana ditandai oleh keterampilan kerja. Karena keterampilan kerja yang dimiliki seseorang menyebabkan ia dapat menyelesaikan pekerjaan itu secara lebih baik.

Keterampilan kerja seseorang diperoleh dari latihan, yakni semacam kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan teknik dan prosedur tertentu. Dengan demikian prosedur teknik kerja itu merupakan suatu kegiatan yang sudah terkondisi. Meskipun demikian, apakah itu merupakan satu-satunya petunjuk bahwa seseorang memiliki ketrampilan kerja. Tentu hal ini bukan satu-satunya petunjuk. Karena penguasaan terhadap teknik kerja ditunjang pula oleh pengetahuan yang dimiliki, minimal pengetahuan yang bersifat teknis.

Salah satu petunjuk dari definisi profesi adalah adanya keterampilan kerja.³² Namun, tidak setiap orang yang memiliki keterampilan bekerja pada sesuatu bidang dipandang sebagai seorang profesional. Tingkatan keterampilan kerja ada yang

³² Ali, Mohammad, Pengembangan Kurikulum (Bandung, Sinar Baru 1985), h.34

berada pada taraf keterampilan teknis dan ada yang sampai pada taraf keterampilan yang didukung oleh konsep dan teori tertentu. Pada taraf keterampilan teknis dapat dikatakan sebagai “vokasional”, sedang pada taraf yang lebih tinggi baru dikatakan “professional”³³

Penekanan profesi bukan hanya semata-mata pada keterampilan vokasional seperti digambarkan di atas. Profesi lebih banyak menekankan kepada keahlian pada sesuatu bidang. Dengan keahlian ini dimaksudkan bahwa seseorang yang menyandang predikat profesi selalu melandaskan pekerjaannya pada intelektual yang dimiliki, artinya ia selalu berpijak pada konsep dan teori tertentu, sehingga apa yang dikerjakannya selalu bersifat nalar.

Suatu jabatan profesional bercirikan adanya sifat kepekaan terhadap implikasi kemasyarakatan dari pekerjaan, dan hasil pekerjaan di masyarakat selalu di tanggapi oleh profesi itu dengan keahlian. Dengan demikian dimungkinkan berkembangnya bidang yang ditekuni sejalan dengan dinamika kehidupan. Jadi, suatu pekerjaan profesional ternyata menuntut beberapa persyaratan. Secara umum persyaratan itu meliputi:³⁴

1. Menuntut adanya keterampilan yang berlandaskan pada konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan keprofesiannya.
3. Menuntut adanya tingkat pendidikan tinggi
4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
5. Memungkinkan pengembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Dalam dunia usaha termasuk dalam hal ini profesi kehumasan, bahwa pelaksanaan suatu pekerjaan menuntut suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut. Kemampuan yang harus dimiliki tersebut mempunyai korelasi langsung dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki dan pelatihan yang pernah diikuti oleh pekerja tersebut. Setiap tugas pada bidang pekerjaan tertentu memiliki prosedur dengan karakteristik yang berbeda.

Selain itu sebagai akibat dari perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat, perubahan dan perkembangan teknologi serta perubahan dan perkembangan kemajuan suatu zaman, maka dunia usaha menjadi bersifat sangat dinamis dan memiliki frekuensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, dunia usaha harus melakukan penyesuaian atau perubahan dalam berbagai hal. Salah satu penyesuaian dan perubahan yang harus dilakukan tersebut adalah perubahan persyaratan atau tuntutan yang berhubungan dengan profesionalisme kerja, dengan kata lain terjadi perubahan kebutuhan yang berhubungan dengan tenaga kerja.

Seperti halnya perubahan yang terjadi dalam dunia usaha. Maka dalam dunia pendidikan terjadi hal yang sama. Bahwa terjadinya perubahan tuntutan atau kebutuhan dalam masyarakat, perubahan dan perkembangan teknologi menyebabkan terjadinya perubahan sistem pendidikan (dimana program pembelajaran adalah bagian dari pendidikan tersebut)

³³ Ib.id, h34

³⁴ Op.Cit, h 35.

Mengenai istilah kebutuhan, dapat kita artikan sebagai kondisi dari hal/ benda yang diperlukan namun belum ada atau tidak ada, sehingga menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan inilah yang perlu dikaji lebih jauh untuk menentukan apa sebenarnya yang dibutuhkan.

Stufflebeam(1985)³⁵ menyatakan bahwa: ***“A need is something that is necessary or useful for the fulfillment of definisable purpose”***. Sedangkan Kaufman (1986)³⁶ menjelaskan bahwa kebutuhan adalah kesenjangan yang dapat diukur atau jarak antara apa yang ada sekarang dengan hasil yang diinginkan. Untuk mengetahui kebutuhan tersebut maka dapat dilakukan melalui analisa kebutuhan, yaitu analisa kesenjangan antara kenyataan dan harapan, apa yang ada dan apa yang seharusnya ada, untuk kemudian ditentukan skala prioritas dan pemecahannya.

Kaufman (1986) menyatakan bahwa analisa kebutuhan adalah suatu proses untuk identifikasi, dokumentasi, dan pembenaran adanya jarak antara apa yang ada dan harapan dari produk/ hasil baik secara internal dan eksternal. Lebih lanjut Kaufman menambahkan bahwa melalui analisa kebutuhan, organisasi dapat menentukan keputusan apakah pekerjaan yang dilakukan sukses, apakah diperlukan pembaharuan dan apakah harus melakukan penghapusan atau modifikasi.

Sebagai satu contoh hasil kajian kebutuhan perubahan tuntutan tenaga kerja dalam kaitannya dengan perubahan kemajuan zaman, yaitu Globalisasi, seperti yang dikutip oleh Helmi Zainuri³⁷ dalam makalahnya dinyatakan bahwa perubahan tuntutan profil SDM di era globalisasi adalah perubahan dari yang bercirikan Think function menjadi Think Business, Pay entitlement menjadi Pay Performance, Individual contributor menjadi Team member, Single skilled menjadi Multi skilled. Selanjutnya oleh Helmi dinyatakan bahwa kualitas SDM yang dibutuhkan oleh dunia usaha sebagai wujud profesionalisme saat ini dalam hubungannya dengan era globalisasi adalah sehat jasmani dan rohani, mempunyai kompetensi profesi, berkepribadian, berbudaya industri dan berwawasan global.

Menurut Ruslan (2001)³⁸ yang dikutip dalam buku M.S Soemirat Soleh & Elvinaro Ardianto, kiat menjadi profesional, yaitu harus memiliki ciri-ciri khusus tertentu yang melekat pada profesi yang ditekuni oleh yang bersangkutan, khususnya profesional *Public Relation* yang secara umum memiliki ciri-ciri, sebagai berikut :

1. memiliki skill atau kemampuan, pengetahuan tinggi oleh orang umum lainnya, apakah itu diperoleh dari hasil pendidikan atau pelatihan yang diperolehnya, dan ditambah dengan pengalaman selama bertahun-tahun yang telah ditempuhnya sebagai profesional.
2. Mempunyai kode etik dan merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis dan normatif dalam suatu bentuk aturan main, dan perilaku ke dalam “kode Etik” yang merupakan standar atau komitmen moral kode perilaku (code of conduct) dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku profesi dan fungsi yang memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan jaminan dan

³⁵ Stufflebeam, Conducting educational needs assessment (Boston : Kluwer NyhofPub. 1986).h,12

³⁶ Stufflebeam, Ibid h 12.

³⁷ Zainuri, Jelmi, Tantangan pasar kerja di Era Globalisasi, Makalah seminar Politeknik Unidp (jakarta 2002)

³⁸ Soemirat, Soleh , M.S. & Elvinaro Ardianto, . Dasar-Dasar Public Relation (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2002) h. 176

pedoman bagi profesi yang bersangkutan untuk tetap taat dan mematuhi kode etik tersebut.

3. Memiliki tanggung jawab profesi dan integritas pribadi yang tinggi baik terhadap dirinya sebagai penyandang profesi humas, maupun terhadap publik, iklim, pimpinan, organisasi, perusahaan, pengguna media massa hingga menjaga martabat serta nama baik bangsa dan negaranya.
4. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat, dan dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya, yaitu dalam pengambilan keputusan adalah meletakkan kepentingan pribadinya demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negaranya. Memiliki jiwa pengabdian dan semangat dedikasi tinggi dan tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan jasa keahlian dan bantuan kepada pihak lain yang memang membutuhkannya.
5. Otonomisasi organisasi profesional, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi humas, yang mempunyai kemampuan dalam perencanaan program kerja, strategik, mandiri dan tidak bergantung pihak lain serta yang sekaligus dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, dapat dipercaya dalam menjalankan operasional, peran dan fungsinya. Di samping itu, memiliki standar dan etos kerja profesional yang tinggi.
6. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan dan mentertibkan perilaku standar profesi sebagai tolak ukur agar tidak dilanggar. Selain organisasi profesi sebagai tempat berkumpul, fungsi lainnya adalah merupakan wacana komunikasi untuk saling menukar informasi, pengetahuan dan membangun rasa solidaritas sesama rekan anggota.

Sebagai seorang profesional Humas harus mampu bekerja atau bertindak melalui pertimbangan yang matang dan benar, yaitu dapat membedakan secara etis mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak, sesuai dengan pedoman kode etik profesi yang disandang. Apa yang diuraikan diatas, merupakan pengenalan *Public Relations* dengan penggambaran didalam hubungannya dengan fungsi dan peran manajemen (*management concept*)

Dalam gambaran itu nampak bagaimana pentingnya Humas dewasa ini di dalam membantu sebagai staf kepada keberhasilan manajemen. Bantuan itu terutama dengan pemberian data dan informasi yang aktual dan akurat, serta pertimbangan yang berharga mengenai pendapat dan keinginan masyarakat (public) untuk pengambilan keputusan (decision-making), baik tentang kebijaksanaan (policies) maupun tentang tindakan-tindakan yang harus dilakukan (operations).

Maka sepatutnyalah bahwa unit Humas itu berada langsung di bawah *Top Executive Officer* di dalam kedudukannya di suatu organisasi. Maka mengenai konsep fungsional dari Humas itu (functional concept), maka menurut Cutlip & Center³⁹, pejabat humas itu diangkat oleh Pimpinan dalam manajemen dengan tugas-tugas sebagai berikut :

a). Untuk mencukupi dan memastikan masukan berupa pendapat-pendapat yang sebenarnya mewakili dari masyarakat yang ada kaitannya dengan organisasi, sehingga kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil dapat sesuai dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan pendapat-pendapat yang beraneka ragam dari masyarakat tersebut.

³⁹ .Soenarko *Public Relations ,pengertian,Fungsi dan peranannya*, (CV.Papyrus, Surabaya) h.103

b) Memberi pertimbangan kepada manajemen mengenai jalan dan cara yang sebaiknya di dalam membentuk kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan organisasi untuk mendapatkan persetujuan masyarakat sepenuhnya.

c) mengupayakan dan melaksanakan program-program sehingga memperoleh tafsiran-tafsiran dan pendapat-pendapat yang menguntungkan mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang dilakukan organisasi.

Menghadapi gejala yang dapat berkembang Humas harus mempersiapkan kegiatan-kegiatan untuk menanggulangnya atau mengantisipasinya dengan program yang efektif. Sehingga pelaku-pelaku Humas, menurut survey yang telah dilakukan oleh “ *The Education Committee Of the Public Relation Society Of America*”,⁴⁰ sedikitnya melaksanakan delapan macam pekerjaan pokok, yaitu :

a. *Writing*, membuat laporan, edaran, naskah selebaran, tulisan untuk siaran TV dan Radio, teks pidato, Lembaran-lembaran informasi dan lain sebagainya.

b. *Editing*, penyunting siaran-siaran untuk pegawai, persiapan laporan-laporan untuk pemegang saham, dan hubungan-hubungan manajemen dengan para karyawan serta kelompok masyarakat di luar organisasi.

c. *Placement*, penempatan berita-berita dan informasi-informasi di pers, radio dan TV serta majalah.

d. *Promotion*, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan wartawan-wartawan, pameran, pertunjukan-pertunjukan; perayaan - perayaan ulang tahun, peringatan hari-hari istimewa, kontes-kontes dan lain sebagainya.

e. *Speaking*, tampil berbicara didepan kelompok-kelompok masyarakat yang bersangkutan, mempersiapkan pidato-pidato dan semacamnya.

f. *Production*, mempelajari seni dan pengetahuan untuk menerbitkan surat-surat edaran, laporan-laporan khusus, buku-buku kecil, gambar-gambar, foto dan lain sebagainya.

g. *Programming*, menentukan kebutuhan-kebutuhan, tujuan-tujuan dan langkah-langkah untuk melaksanakan suatu proyek

h. *Institutional Advertising*, pengenalan nama dan keandalan organisasi melakukan koordinasi dengan bagian periklanan.

Disamping itu perlu sekali pejabat-pejabat Humas untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek masyarakat, yang tidak dapat ditinggalkan pula adalah mengadakan penelitian-penelitian yang terus-menerus yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut diatas.

Kurikulum dituntut untuk dibuat dengan memiliki daya penyesuaian yang tinggi, dengan kata lain kurikulum dituntut mampu menyesuaikan dengan adanya perubahan yang terjadi di dunia usaha sebagai wujud profesionalisme.

Untuk melihat kesesuaian kurikulum program kehumasan dengan tuntutan profesionalisme pekerjaan di dunia usaha berarti kita harus membuat kajian dari dua hal tersebut, dengan melakukan *matching* atau membuat kecocokan antara keduanya. Logikanya semakin banyak indikator kurikulum program kehumasan yang diterima oleh dunia usaha berarti derajat kesesuaiannya semakin tinggi. Dengan kata lain kurikulum program kehumasan tersebut memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan zaman.

Dalam melakukan proses mempertimbangkan kesesuaian kurikulum program kehumasan FIKOM UPDM(B) dengan tuntutan profesionalisme kerja, penulis menggunakan strategi pendekatan penilaian kurikulum, seperti materi pembelajaran, metode pembelajaran dan media pembelajaran untuk mengetahui apakah kurikulum program kehumasan tersebut

⁴⁰ Ibid. h.105

sudah sesuai atau tidak dengan tuntutan / kebutuhan lapangan pekerjaan sebagai wujud profesionalisme .

Untuk mencapai hasil penilaian yang valid , penulis merujuk pendapat Tarence Jackson (1989)⁴¹ yang memberikan rambu-rambu dalam melakukan penilaian, dalam penelitian ini adalah penilaian kesesuaian kurikulum program kehumasan dengan tuntutan lapangan kerja ini. responden yang tepat adalah profesional dunia usaha yang relevan dengan keahlian profesi kehumasan.

Dalam penelitian evaluasi program pembelajaran ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan aspek-aspek yang mengacu pada model evaluasi program pembelajaran yang diterapkan oleh Stufflebeam, atau yang dikenal dengan CIPP (Context, Input, Proses, Product). Oleh Tarence Jackson⁴² rambu CIPP tersebut dimodifikasi dan dikelompokkan setiap dimensi yang akan dilihat sebagai berikut :

(1) Evaluasi Konteks

Pada dasarnya evaluasi konteks mempertanyakan kesesuaian kurikulum program kehumasan dengan tuntutan dunia usaha sebagai wujud profesionalisme. Intinya adalah apa seharusnya isi kurikulum dan fokusnya apa.

(2) Evaluasi Input (Masukan)

Yaitu meliputi dokumen & Fasilitas apa saja yang digunakan dan seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga sesuai dengan tuntutan dunia usaha sebagai wujud profesionalisme.

(3) Evaluasi Proses.

Yaitu meliputi prestasi siswa dan daya serap mahasiswa, kualitas pembelajaran , komponen kurikulum yang lemah jika ada.

(4) Evaluasi Produk (Keluaran)

Dampak kurikulum terhadap tamatan, tanggapan pengguna tamatan, sejauh mana keberhasilan tamatan bekerja di industri.

Dalam melaksanakan evaluasi dan pemantauan pendidikan, agar input / masukan, proses dan out-put/keluaran sesuai yang diharapkan harus memperhatikan beberapa prinsip evaluasi. Prinsip standar evaluasi yang paling komprehensif yang dikembangkan oleh *Committee of Standard for Education Evaluation (joint Committee, 1981)* dengan ketuanya Daniel Stufflebeam adalah :⁴³

a) Utility (bermanfaat dan praktis).

b) Accuracy (secara teknik tepat)

c) Feasibility (realistik dan teliti)

d) Propriety (dilakukan dengan legal dan etik)

Dengan tujuan untuk memperoleh data faktual dan hasil penilaian yang memiliki daya guna maka penulis menerapkan prinsip evaluasi yang dikemukakan Daniel Stufflebeam tersebut yaitu : *Utility, Accuracy, Feasibility* dan *Propriety*.⁴⁴

H. KERANGKA BERPIKIR

Cara pandang pendidikan di Indonesia saat ini mengalami perubahan seiring dengan terjadinya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari yang semula sistem pemerintahan manajemen terpusat (sentralisasi) berubah menjadi sistem pemerintahan desentralisasi. Perubahan sistem pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik menjadi bersifat desentralistik dimana masing-masing daerah

⁴¹ Jackson, Tarence, *Evaluation : Relating training to Business performance* (California : Kogan Page Ltd, 1989), h.2

⁴² <http://www.scis.nova.edu/terrell//doctoral/1998/dete747/cipp.html>

⁴³ Tayibnapis, Yusuf, Farida *Evaluasi Program* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000), h.8.

⁴⁴ Ibid. Tayibnapis, Yusuf, Farida

mempunyai kewenangan untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan, harus antisipatif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemerintahan setempat, serta perkembangan dunia usaha dimasa yang akan datang.

Dunia pendidikan khususnya fakultas ilmu komunikasi program studi kehumasan, dalam fungsinya sebagai penyedia tenaga kerja, dituntut dan harus memperhitungkan peluang dan kualifikasi lulusan sebagai calon tenaga kerja. Dalam kenyataan yang ada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha sebagai wujud profesionalisme terjadi begitu cepat dan pesat, dan sebaliknya yang terjadi dalam dunia pendidikan.

Kebutuhan dunia usaha adalah tenaga kerja yang siap pakai dan memiliki nilai profesional pada zamannya. Kebutuhan dunia usaha akan selalu berubah sesuai perkembangan zaman dengan kecepatan perubahan yang tinggi. Kondisi di dunia usaha yang seperti ini menuntut dunia pendidikan, khususnya fakultas ilmu komunikasi Program studi kehumasan untuk dapat menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Atau dengan kata lain memenuhi standar pasar. Sehingga dengan demikian menuntut dunia pendidikan melakukan penyesuaian dan perubahan sistem, dalam hal ini kurikulum program kehumasan (melalui evaluasi kurikulum program kehumasan itu sendiri dan penilaian kebutuhan / tuntutan dunia usaha sebagai wujud profesionalisme) agar tamatannya menduduki posisi kerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha sebagai wujud profesionalisme.

Strategi evaluasi program pembelajaran dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi kurikulum program kehumasan tersebut dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang mengambil aspek-aspek penelitian yang dikembangkan oleh Stufflebeam, dikenal dengan CIPP (Context, Input, Process, Product).⁴⁵

Context : Evaluasi pada deskripsi program, alokasi waktu yang diberikan serta jenjang kemampuan pada setiap tingkatannya, kesesuaiannya kompetensi yang diperlukan pada jenjang karir di dunia usaha.

Input (Masukan) : Evaluasi pada bahan pembelajaran, dan fasilitas

Process(Proses): Evaluasi kesesuaian pada proses kegiatan pembelajaran dengan prosedur praktek di dunia usaha sebagai wujud profesionalisme.

Product(Keluaran): Evaluasi ketercapaian tujuan program pembelajaran yang dipandang dari kesesuaian hasil pendidikan yaitu kompetensi tamatan dengan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan dunia usaha sebagai wujud profesionalisme.

Program pembelajaran Program studi kehumasan sebagai suatu konsentrasi studi dari ilmu komunikasi relatif baru di Universitas Prof. Dr . Moestopo (Beragama) , dalam perkembangannya konsentrasi studi kehumasan ini baru dilakukan sejak tahun 1998 berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional No 001/BAN-PT/AK-1/VIII/1998, walau dalam perkembangannya jurusan hubungan masyarakat ini sudah berlangsung lama yaitu tahun 1964 dengan status DIAKUI dan tahun 1993 dengan status DISAMAKAN.

Kurikulum program pendidikan yang diterapkan kehumasan FIKOM UPDM(B) ketika berubah dari jurusan menjadi konsentrasi studi, yaitu ditahun 1994 jauh lebih menekankan kepada teori dibanding aplikasi. Namun dengan keluarnya aturan

⁴⁵http://www.knowledgebank.irri.org/cglrc/icraf/toolkit/The_CIPP_evaluation_model.htm

kurikulum Mendiknas No 232/U/2000 yang dilengkapi dengan aturan Mendiknas No 045/U/2002 mengenai KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) maka program pembelajaran kehumasan FIKOM UPDM(B) mulai dikerucutkan pada kurikulum berbasis kompetensi, melalui proses operasionalisasi dari tahun 1998 hingga 2004 sebagai wujud mencoba menjawab tantangan profesionalisme dunia usaha. Bila dilihat dari kurikulum program sebelumnya yang nota bene masih merupakan jurusan, kurikulum humas, tetap menjadi prosentase terbesar pada bidangnya yaitu program studi kehumasan dengan memiliki optimalisasi pembelajaran juga lebih besar, namun mengapa dalam prosesnya juga masih dianggap belum memadai.

Dengan terjadinya perubahan - perubahan tersebut timbul pertanyaan apakah kurikulum program kehumasan masih sesuai dengan tuntutan profesionalisme kerja yang merupakan wujud aplikasi dunia usaha saat ini?. Pertanyaan ini lah yang hendak dijawab dalam penelitian ini.

Pertanyaan akan keadaan kurikulum program kehumasan dalam menyesuaikan perubahan dan perkembangan zaman (globalisasi & reformasi) dalam kaitannya fungsi FIKOM UPDM(B) sebagai lembaga pendidikan penyedia tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha sebagai wujud profesionalisme, maka ada dua hal yang sangat penting untuk dilakukan seperti yang telah dikemukakan diatas yaitu : **Pertama**, melakukan penilaian kurikulum program pendidikan tersebut, dan **kedua** melakukan penilaian kebutuhan / tuntutan dunia usaha.

Dalam hal untuk melakukan penilaian kurikulum program kehumasan, maka timbul pertanyaan siapa yang lebih tepat melakukan evaluasi/ penilaian kurikulum program kehumasan tersebut ?

Tarence (1989)⁴⁶ menyatakan bahwa evaluator kurikulum program kehumasan adalah seorang profesional pada bidangnya. Maka dalam melakukan evaluasi kurikulum pada Program studi kehumasan ini penulis menemukan responden penilaian kesesuaian kurikulum adalah :

- (a) Profesional di dunia usaha sebagai wujud profesionalisme bidang keahlian kehumasan yang mempekerjakan lulusan FIKOM UPDM(B)
- (b) Lulusan FIKOM UPDM(B) Program studi kehumasan yang bekerja pada bidang kehumasan
- (c) Dosen dari Asosiasi profesi atau profesional dari dunia usaha yang mengajarkan di FIKOM UPDM(B) atau membimbing pada saat mahasiswa itu melakukan praktek lapangan

Sedangkan dalam hal melakukan penilaian analisis Kebutuhan / tuntutan kerja pada dunia usaha dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Kaufman (1986)⁴⁷ yang terdiri dari tujuh langkah sbb:

1. Identifikasi
2. Penentuan syarat pemecahan masalah
3. Seleksi strategi pemecahan masalah
4. Pelaksanaan pemecahan masalah
5. Penentuan keefektifan hasil pelaksanaan pemecahan masalah
6. Revisi bila diperlukan.

⁴⁶ Jackson, Tarrence, Evaluation, Op cit, h.04

⁴⁷ Stufflebeam, Conducting educational needs assessment (Boston : Kluwer NyhofPub. 1986).h,12

Agar data yang diperoleh berupa data kualitatif yang faktual dan akurat, maka dalam Penelitian evaluasi menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik survey. Sedang strategi pengumpulan data yang menggunakan metode ini adalah berupa :

wawancara yaitu melakukan reportasi atau dialog dengan sumber baik pengguna dan obyek kurikulum yang benar-benar merasakan atau terkena dampak dari kurikulum program kehumasan, sehingga seberapa besar keberhasilan kurikulum program kehumasan dapat terukur .

Observasi dilakukan terhadap aktivitas mahasiswa dan dosen dalam mengaktualisasikan program pendidikan. Untuk menguatkan hasil observasi tersebut, peneliti akan mewawancarai dosen program studi tersebut, pimpinan program studi dan para lulusan. Selain itu , juga dilakukan analisis dokumen yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan laporan-laporan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Data lapangan dikumpulkan dan di rangkum dalam bentuk catatan lapangan, yang diperoleh dengan melakukan pengamatan , wawancara dan analisis dokumen. Observasi dan wawancara dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan pengumpulan data evaluasi. Analisis isi dokumen dilaksanakan dengan memperhatikan pada dua jenis realitas, yaitu realitas data dan realitas yang ingin diketahui peneliti, yaitu menggambarkan target inferensi . Seperti dikatakan Krippendorff , analisis isi harus menunjukkan perhatian kepada dua jenis realitas, realitas data dan realitas yang ingin diketahui peneliti. Idealnya, analisis isi mulai dengan memperjelas untuk dirinya sendiri yang ingin dia ketahui dan belum dapat dia amati secara langsung. Kemudian dia mencari data yang dapat memungkinkan dia menarik inferensi-inferensi tentang bagian dunia yang menjadi perhatiannya ini berarti bahwa yang utama adalah menggambarkan target inferensi⁴⁸

Jika dari hasil penelitian ini menyimpulkan harus dilakukan penyesuaian atau perubahan kurikulum program kehumasan, maka implementasi perubahan pada kurikulum program pendidikan tersebut harus memperhatikan beberapa faktor seperti yang dikemukakan oleh Fullen (2000), yaitu : Kebutuhan, kejelasan, kompleksitas, kualitas /praktek, pemerintah setempat, masyarakat pengguna tenaga kerja yaitu dunia usaha, pemimpin lembaga pendidikan, pemerintah pusat dan agen perubahan lainnya.

Menurut Donald Ary, kondisi lingkungan yang memfasilitasi inovasi (terjadinya perubahan) adalah sama pentingnya dengan penjelasan aturan main dalam usaha mencapai tujuan perubahan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan perubahan dan pengembangan kurikulum program kehumasan, maka diharapkan terwujud pembelajaran yang lebih baik.

Kondisi yang dimaksud Donald Ary⁴⁹ adalah sebagai berikut :

1. Inovasi akan berdampak lebih baik
2. Pengetahuan dan keterampilan lebih dikuasai, siswa belajar lebih cepat
3. Fasilitas tersedia, apa yang diperaktekan ada,
4. Alokasi waktu memadai,
5. Siswa memperoleh Reward atau hadiah sesuai pekerjaannya

⁴⁸ Krippendorff, Klaus, Analisis Isi: pengantar Teori dan Metodologi, Terjemahan Farid Wajidi, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991).h. 275

⁴⁹ Ary ,Donald, Lucy cheser dan Asghar Razavier, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, (Surabaya : Usaha Nasional, 1982),h. 329

6. Peserta didik merasa sebagai hal yang penting dan harus mempelajari
7. pemimpin lembaga pendidikan dan tenaga administrasi yang mendukung.
8. Kepemimpinan jelas keberadaannya, peserta didik mendapat dukungan

Idealnya penyesuaian dan perubahan kurikulum program kehumasan yang dituangkan dalam program pembelajaran kehumasan didukung dengan perubahan lingkungan belajar yang meliputi berbagai faktor yang terdapat dalam sistem pendidikan seperti yang telah diungkapkan oleh Donald Ary diatas.

Untuk itu dalam melakukan observasi pelaksanaan kurikulum program kehumasan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran, peneliti mempergunakan kondisi perubahan lingkungan yang dikemukakan Donald Ary sebagai acuan.

Dampak dari berbagai faktor yang mempengaruhi dalam pendidikan menuntut terjadinya proses perkembangan kurikulum sesuai fasilitas dan sarana pendidikan. Pemerintah sebagai salah satu stake holder melalui para agennya yang dalam hal ini para penentu kebijakan telah melakukan pengembangan pendidikan dengan menyusun kurikulum pada berbagai jenjang pendidikan tinggi.

Idealnya, penyesuaian dan perubahan kurikulum harus didukung dengan perubahan lingkungan belajar yang meliputi berbagai faktor yang terdapat dalam sistem pendidikan, seperti fasilitas dan kualitas sumber daya manusia.

C. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teori dan analisa data hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan terminologi kompetensi, kriteria unjuk kerja (performance) yang digunakan pada setiap standar prosedur kerja, serta proses pembelajaran di program studi kehumasan dan di dunia kerja bidang kehumasan. Setelah dilakukan kajian secara mendalam, verifikasi data yang berdasar dari hasil wawancara, observasi dan diskusi dengan para pakar kehumasan, dan analisa sinkronisasi berdasarkan indikator ada dan tidak ada kompetensi tersebut dalam kurikulum program studi kehumasan, serta dibutuhkan dan tidak dibutuhkannya kompetensi tersebut di dunia kerja program studi kehumasan, maka kesesuaian secara umum kompetensi kurikulum program studi kehumasan dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja bidang kehumasan dapat dibedakan menjadi dua katagori yaitu sbb :

1. Sesuai :

Kompetensi yang terdapat dalam program studi kehumasan dan dibutuhkan di dunia kerja kehumasan sebagai wujud profesionalisme.

2. Tidak Sesuai :

- a) kompetensi dipelajari di program studi kehumasan tetapi tidak dibutuhkan di program studi kehumasan
- b) Kompetensi dibutuhkan di dunia kerja bidang kehumasan tetapi tidak terdapat dalam kurikulum program studi kehumasan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dari 12 kompetensi dengan 57 mata kuliah yang menjadi indikator penelitian ini yang termasuk dalam katagori 1 ada 7 kompetensi yang terdiri dari 37 mata kuliah (50 %). Yang termasuk dalam katagori 2 a) ada pada 12 kompetensi yang terdiri dari 19 mata kuliah. Sedangkan yang termasuk dalam katagori 2 b) ada 3 kompetensi yaitu kompetensi Hubungan Perburuhan/Industrial, Komunikasi pemasaran dan Etika Humas.

Kedua, Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan komponen keluaran (product/output) terdapat ketidak sesuaian antara kompetensi yang dikuasai oleh lulusan program studi kehumasan FIKOM UPDM(B) dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja bidang kehumasan. Ketidak sesuaian ini tidak bersifat mutlak atau total, artinya ada unsur yang tidak sesuai namun ada pula unsur yang tidak sesuai.

Dari katagori kompetensi yang sesuai (ada pada kurikulum program stdui kehumasan dan dibutuhkan di dunia kerja bidang kehumasan) sebesar 50 % (37 mata kuliah) tersebut, dikelompokkan dalam dua katagori berdasarkan kemampuan kompetensi lulusan program studi kehumasan yaitu pertama , katagori lulusan program studi kehumasan FIKOM UPDM(B) kompeten dan dipercaya melaksanakan pekerjaan dan kompetensi tersebut sejak lulusan program studi kehumasan FIKOM UPDM(B) mulai bekerja di dunia kerja bidang kehumasan, adalah 50% (6 kompetensi/ 37 mata kuliah) dan katagori kedua adalah luluan program studi kehumasan FIKOM UPDM(B) tidak tuntas menguasai kompetensi tersebut (tidak mastery), sehingga lulusan program studi kehumasan FIKOM UPDM(B) tidak dipercaya oleh dunia kerja idang kehumasan untuk mengerjakan sepenuhnya pekerjaan pada kompetensi tersebut ketika lulusan program studi kehumasan FIKOM UPDM(B) mulai di dunia kerja, adalah 6 % (6 kompetensi atau 17 mata kuliah).

Secara keseluruhan dalam tinjauan komponen keluaran (product/output) dapat disimpulkan bahwa lulusan program studi kehumasan FIKOM UPDM(B) pada prinsipnya telah memiliki kompetensi yang amat mendasar namun masih harus mengikuti pendidikan dan pelatihan di dunia kerja yang menerima untuk dapat bekerja dan menempati posisi sebagai staf kehumasan di dunia kerja bidang kehumasan.

Dengan demikian tujuan pendidikan di program studi kehumasan sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 232/U/2000 belum tercapai. Karena dalam kenyataanya lulusan program studi kehumasan belum sepenuhnya menguasai kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

Namun demikian, dikarenakan dunia kerja program studi kehumasan sangat membutuhkan tenaga kerja lulusan program studi kehumasan FIKOM UPDM(B)(Demand tenaga kerja lebih besar dari jumlah lulusan program studi kehumasan), maka hal ini menjadikan lulusan program studi kehumasan sebagai tenaga kerja yang diperlukan, walupun kualitas lulusan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kualitas persyaratan yang dibutuhkan oleh dunia kerja bidang kehumasan.

Ketiga. Kurikulum program studi kehumasan secara konsep dinyatakan memiliki karakteristik competency based curriculum, Broad based competency, mastery learning dan artikulasi internal dan eksternal serta memiliki fleksibilitas. Dalam tinjauan komponen masukan (input), implemetasi kurikulum program studi kehumasan terdapat beberapa factor ketidak sesuaian dengan disain atau rekonstruksi kurikulum itu sendiri.

Disain kurikulum mengharuskan pembelajaran berbasis kompetensi, dan mastery learning dengan konsekuensi dosen harus mampu melaksanakan kegiatan dalam kelas yang terdiri dari tiga aktifitas akademik seperti melakukan kegiatan tatap muka , kegiatan akademik terstruktur dan kegiatan akademik mandiri, serta paduan umum dengan menyiapkan Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) dan kontrak kerja (termasuk tugas-tugas) yang kemudian disampaikan kemahasiswa,, Namun implementasinya dosen mengajar klasikal, (rasio 1 dosen: 50 mahasiswa), sistem evaluasi standar pembelajaran normal kelas, Sedangkan referensi yang tersedia masih terbatas, banyak kompetensi yang belum memiliki reverensi yang sebenarnya , selain itu pula literatur yang tersedia masih berbahasa inggris yang masih mahal dan sulit dicari.Selain itu untuk fasilitas praktek program studi kehumasan yang belum focus masih menggunakan fasilitas yang umum disediakan.

Penerapan Broad based competency mengharuskan program studi kehumasan membelajarkan kompetensi dasar-kehumasan pada semeseter 1 dan 2. Dalam struktur program pembelajaran program studi kehumasan pada setiap kompetensinya tidak diberikan

secara utuh, pada semester satu diberikan materi dasar seluruh kompetensi program studi kehumasan, pada semester kedua juga masih sama, namun pada semester ketiga hingga kelima diberikan materi lanjutan. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi dalam struktur program kurikulum masih bersifat parsial dan belum merupakan satu kompetensi yang utuh pada setiap kompetensi yang diberikan. Pernyataan tersebut didukung pendapat pakar kehumasan, yang menyatakan bahwa dalam kurikulum program studi kehumasan belum tercermin kompetensi lulusan secara spesifik. Bahkan kurikulum tersebut terlalu luas dan berat bagi mahasiswa.

Keempat, dari segi proses (process), kurikulum program studi kehumasan ini memerlukan banyak revisi pada beberapa kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja bidang kehumasan.

Kompetensi / kelompok mata kuliah program studi kehumasan yang unsur prosesnya belum sesuai dengan standar proses yang ada di dunia kerja bidang kehumasan adalah sebagai berikut :

- 1 Kompetensi , imtak, budi pekerti luhur, Berkepribadian, mandiri, Tanggung Jawab Sosial yang terangkum dalam kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian.
2. Kompetensi penguasaan ilmu dan keterampilan adalah kompetensi yang merupakan kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan
- 3 Kompetensi tenaga ahli dan kekayaan adalah kompetensi yang merupakan kelompok mata kuliah Keahlian Berkarya, seperti mata kuliah sosiologi komunikasi dan komunikasi politik
4. Kompetensi Sikap dan Prilaku adalah kompetensi yang merupakan kelompok mata kuliah Prilaku Berkarya, seperti, Dasar-dasar Logika, Komunikasi Sosial Pembangunan, Sistem Komunikasi Indonesia, Komunikasi Lintas Budaya, dan Praktek Penelitian Komunikasi
5. Kompetensi kaidah bermasyarakat adalah kompetensi yang merupakan kelompok mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat.

Sedangkan kompetensi/ kelompok mata kuliah kurikulum program studi kehumasan yang unsur prosesnya sesuai dengan standar proses yang ada di dunia kerja bidang kehumasan (namun masih perlu ditingkatkan kualitas dan kecepatannya) adalah sebagai berikut :

- 1) Menulis dan menyiarkan pres release (siaran pers), foto-foto (gambar-gambar) dan artikel khas (feature)
- 2) Mengorganisasi Konferensi pers, resepsi pers dan kunjungan para wartawan (facility visit) serta menyelenggarakan Iven dan komunikasi public serta Menyiapkan pameran dan peragaan
- 3) Mempersiapkan biro informasi untuk pers
- 4) Mengatur waktu wawancara dan, briefing menyiapkan arsip yang akan diberikan kepada media cetak dan elektronik
- 5). Menyiapkan jalur komunikasi internal, antara lain membuat majalah internal bagi karyawan
- 6). Menulis dan menyiapkan artikel , mengenai sejarah organisasi atau perusahaan, laporan tahunan dan Menyiapkan bahan-bahan corporate identify
- 7). Menyiapkan presentasi slide dan melakukan kegiatan promosi
- 8). Menyiapkan film-film, kaset video, dokumentasi
- 9). Mengatur kegiatan kemitraan
- 10). Menyelenggarakan Survei Pendapat, Monitoring dan Evaluasi program Humas, Riset dan Audit Humas
- 11). Menjadi penghubung dengan lembaga kemitraan lain baik nasional maupun internasional
- 12). Memantau Balikan dan guntingan pers , serta mengadakan evaluasi dari hasil pemantauan ini.

Kelima, dalam tinjauan komponen konteks kurikulum, dikaji kesesuaian dari lingkungan sosial dan lingkungan budaya di program studi kehumasan dan di dunia kerja. Di program studi kehumasan, Lingkungan sosial adalah masyarakat pendidikan sedangkan di dunia kerja adalah lingkungan masyarakat bisnis. Dari lingkungan budaya belajar untuk mencapai prestasi, sedangkan di dunia kerja adalah untuk menapai keuntungan.

Dalam implementasi kurikulum program studi kehumasan telah menerapkan upaya penyesuaian konteks pendidikan di program studi kehumasan dengan konteks dunia kerja melalui program praktek kerja di dunia kerja pada semester 8

Dapat disimpulkan bahwa program studi kehumasan sudah melakukan upaya penyesuaian konteks kurikulum dengan dunia kerja, namun belum berhasil secara maksimal sehingga hasil / keluaran (product /output) kurikulum pun tidak maksimal. Lulusan sebagai fokus penelitian kesesuaian ini disimpulkan belum memiliki kesesuaian sepenuhnya dengan dunia kerja.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian di atas dapat ditampilkan implikasi sebagai berikut :**Pertama**, Secara umum hasil temuan penelitian ini menyatakan bahwa antara kompetensi kurikulum program studi kehumasan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja bidang kehumasan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai.

Implikasi dari hasil temuan penelitian ini adalah perlunya dilakukan penyesuaian dan pengembangan kurikulum program studi kehumasan secara menyeluruh yang disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan dunia kerja bidang kehumasan, dan diperlukan adanya partisipasi dari berbagai pihak yang terkait – khususnya dunia kerja bidang kehumasan dalam penyesuaian dan pengembangan kurikulum program studi kehumasan.

Ke tujuh kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja bidang kehumasan yang pada program studi kehumasan dijabarkan dalam tiga puluh tujuh mata kuliah masih perlu dianalisis untuk penentuan tingkat kesulitannya dan teknis pembelajarannya, dan perlunya dilakukan penyusunan kembali program kurikulum, kemudian dilakukan sosialisasi kurikulum hasil penyesuaian tersebut keseluruh program studi kehumasan serta ke dunia kerja bidang kehumasan sebagai pengguna tenaga kerja.

Kedua, hasil analisis penilaian pelaksanaan kurikulum menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran di program studi kehumasan FIKOM UPDM(B) dan kebutuhan dunia kerja bidang kehumasan – tidak sepenuhnya sesuai pada kompetensi masukan (input)

Kondisi ketidak sesuaian tersebut dikaji berdasarkan indicator system pembelajaran, modul serta fasilitas yang digunakan di program studi kehumasan FIKOM UPDM(B). Dalam sistem pembelajaran di program studi kehumasan FIKOM UPDM(B) , dosen mengajar dengan system klasikal sedangkan dalam disain kurikulum pembelajaran berbasis kompetensi. Begitu pula dalam proses evaluasi pembelajaran, yang dilakukan secara internal oleh dosen dan eksternal oleh asosiasi profesi terdapat ketidak sesuaian dalam beberapa hal yang dipantau melalui dokumen yakni format evaluasi, standar ketercapaian kurikulum.

Implikasi kondisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa berbagai factor yang mempengaruhi ketidak sesuaian pada komponen *input* tersebut perlu menjadi kajian dalam penelitian yang lain atau bahkan perlu sesuatu kebijakan pelaksanaan monitoring pembelajaran atau asistensi metode pembelajaran bagi para dosen program studi kehumasan FIKOM UPDM(B)

Ketiga, berdasarkan hasil analisis keluaran (product/ output) kurikulum, dalam hal ini adalah kesesuaian kualifikasi lulusan program studi kehumasan dengan kebutuhan dunia kerja bidang kehumasan, disimpulkan bahwa tujuan kurikulum belum tercapai maksimal, namun demikian dunia kerja sangat membutuhkan tenaga kerja dalam kualifikasi bidang kehumasan. Temuan ini dapat menginformasikan kebutuhan pasar kerja di dunia kerja bidang kehumasan dan perlu segera diambil langkah-langkah kebijakan untuk peningkatan kualifikasi lulusan program studi kehumasan sebagai tenaga kerja di bidang program studi kehumasan,serta menambah dan

memperbanyak jumlah penerimaan mahasiswa baru atau bahkan program studi kehumasan baru.

Keempat, hasil analisa proses (process) pada setiap kompetensi yang terdapat di program studi kehumasan dan dibutuhkan di dunia kerja bidang kehumasan dapat disimpulkan hanya ada 7 kompetensi yang terdiri dari 33 mata kuliah yang sesuai dari 12 kompetensi yang terdiri dari 57 mata kuliah yang ada di kurikulum program studi kehumasan. Temuan ini memberi makna bahwa kesesuaian kompetensi kurikulum di program studi kehumasan dengan dunia kerja pada komponen proses kurang dari lima puluh persen sesuai. Dan kondisi ini mengimplikasikan perlunya pembenahan proses pembelajaran di program studi kehumasan FIKOM UPDM(B) yang disesuaikan dengan proses kerja dunia kerja bidang kehumasan.

Kelima, bahwa model evaluasi kurikulum metode deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian para praktisi profesional bidang kehumasan yang merupakan lulusan program studi kehumasan FIKOM UPDM(B) ini dapat digunakan sebagai model evaluasi kurikulum pada program keahlian yang lain.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian seperti yang telah dikemukakan di muka, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

Pertama, Kepada Direktorat Pendidikan Tinggi (Direktorat Dikti) sebagai penentu kebijakan kurikulum :

a. Karakteristik kurikulum program studi kehumasan adalah berbasis kompetensi. Idealnya pelaksanaan kurikulum dapat sesuai dengan karakteristik kurikulum tersebut, namun kenyataannya banyak kendala di program studi kehumasan untuk melaksanakan kurikulum sesuai desain atau rekonstruksi kurikulum program studi kehumasan tersebut. Hendaknya kurikulum program studi kehumasan dilakukan pengembangan dan penyesuaian karakteristiknya dengan mengacu pada kebutuhan dunia kerja.

Khusus untuk kurikulum program studi kehumasan, beberapa kompetensi yang dinyatakan tidak diperlukan atau tidak sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja sebaiknya dikaji kembali dengan melibatkan para pakar. Sedangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja perlu ditingkatkan atau ada penambahan alokasi waktu. Kemudian kompetensi yang diperlukan di dunia kerja tetapi belum ada dalam deskripsi kompetensi program studi kehumasan hendaknya di masukan / dialokasikan dalam kurikulum.

Kesediaan para pakar yang dinyatakan dalam diskusi untuk berpartisipasi dalam penyusunan kurikulum program studi kehumasan hendaknya menjadi pertimbangan dan diakomodir untuk proses penyusunan dan penyempurnaan kurikulum program studi dimasa datang.

b. Kurikulum program studi kehumasan dinyatakan berbasis kompetensi dan berbasis luas, hendaknya dalam pembelajaran baik system pembelajaran maupun fasilitasnya harus mendukung ketuntasan pada penguasaan setiap kompetensi. Fasilitas praktek di program studi, sudah banyak yang perlu diganti dan diperbarui, selain itu para dosen perlu diberi penyegaran pelatihan, pengembangan ilmu yang mutakhir sehingga tidak ketinggalan dengan kemampuan instruktur di dunia kerja.

c. Standar kompetensi program studi kehumasan ada yang tidak memiliki kesamaan pada dunia kerja. Dari penelitian ini diketahui bahwa di dunia kerja sendiri tidak ada kesamaan standar kompetensi untuk setiap bidang pekerjaan, sehingga dunia kerja memiliki criteria unjuk kerja (performance) yang berbeda pada setiap pekerjaan yang dituntut dikuasai oleh tenaga kerjanya. Untuk itu pihak Direktorat Dikti perlu mengambil inisiatif untuk melakukan koordinasi dalam upaya menyatukan persepsi pada berbagai hal yang berbeda tersebut dalam satu standar kompetensi. Diharapkan pendidikan di program studi kehumasan dimasa datang memiliki kurikulum dengan acuan standar kompetensi yang digunakan baik di program studi kehumasan maupun seluruh dunia kerja bidang kehumasan; dengan demikian para meter

ketercapaian kompetensi dalam pendidikan di program studi kehumasan dan dunia kerja memiliki persepsi yang sama :

Kedua, Kepada Program Studi Kehumasan FIKOM UPDM(B) :

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini , beberapa saran yang dapat disampaikan kepada pihak program studi kehumasan adalah sebagai berikut :

a. Perlu penataan dan pendataan ulang fasilitas yang masih baik dan belum ada. Contohnya fasilitas yang sudah ada namun belum lengkap yang ditemui pada waktu penelitian diantaranya: Laboratorium Komputer, Laboratorium radio dan televisi, laboratorium Foto. Untuk fasilitas yang belum ada seperti laboratorium Humas yang berguna untuk konferensi pers, pameran, presentasi dan Lab bahasa segera dilakukan upaya untuk merealisasikan lab tersebut , karena sangat berpengaruh pada ketercapaian dan kelancaran proses belajar mengajar. Sedangkan fasilitas yang masih baik dan dapat dipergunakan, perlu diinvestasikan dan didata ulang jumlahnya. Rasio fasilitas untuk praktek yang ideal adalah 1 :1 (satu peralatan digunakan oleh satu mahasiswa)

b. Perlu dilakukan persamaan persepsi tentang penerapan pembelajaran berbasis kompetensi (Competency based curriculum) kepada seluruh dosen program studi kehumasan melalui lokakarya atau workshop atau panel diskusi baik secara internal ataupun eksternal dengan koordinasi dengan pakar , Dirjen Dikti dan asosiasi profesi kehumasan.

Dalam penelitian masih ditemukan pembelajaran klasikal , satu dosen mengajar seluruh mahasiswa dalam kelas; fasilitas pembelajaran belum tersedia, dan dosen tidak sepenuhnya melaksanakan prosedur umum.

d. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi , Universitas . Prof . Dr . Moestopo (Beragama) disarankan untuk mengajukan pembenahan dosen kehumasan yang juga menjadi standarisasi akreditasi. Oleh karena itu untuk menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dimana seluruh dosen berperan aktif melaksanakan prosedur kerja , maka perlu dilakukan pemantauan terhadap kinerja kerja dosen . Seperti yang diketahui ada prosedur umum yang harus dilakukan oleh dosen.

e. Membuat program lokakarya peningkatan kompetensi pada substansi kehumasan untuk para dosen. Dengan melibatkan para pakar kehumasan, dunia usaha dan Dirjen Dikti, ataupun keikutsertaan pada pelatihan yang diadakan oleh dunia kerja asosiasi profesi bidang kehumasan.

Ketiga, Kepada Asosiasi Profesi Kehumasan selaku organisasi profesi kehumasan.

a. Membuat program penilaian kompetensi yang dimiliki oleh para dosen kehumasan, agar dapat diketahui peta kompetensi dosen program studi kehumasan.

b. Melakukan kerja sama dengan para pakar profesional bidang kehumasan membuat program pengujian kompetensi para dosen kehumasan di program studi , yang kemudian akan menjadi rujukan dalam menyusun program pelatihan yang sesuai dan tepat dengan kebutuhan dosen dan relevan dengan dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Mohamad. *Drs, Pengembangan Kurikulum Di sekolah* .Bandung, Sinar Baru, 1989

Diamond, M. R. Over, Designing And Improving Courses And Curricula In Higher Education (Jossey-Bass Inc... Publishers 350 Sansome Street San Francisco California)

E, Hull, Gene & Jones, L, Howard . *Competency Based Education* , New Jersey 1976

E.Eble Kenneth & Wilbert JMcKeachie (Improving Undergraduate Education,Through Faculty Development.)(Jossey-Bass Limited inc.Publishers 433 California Street)

Farid Wajidi, Jakarta : Rajawali Pers, 1991

Gagne, Robert M, Leslie J. Briggs. *Principles of instructional Design*, United states of America: Halt, Rinehart and Watson, 1974

Hamalik, Oemar, DR., *Manajemen Belajar Di perguruan Tinggi(pendekatan Sistem SKS)*, Bandung: Sinar Baru 1991.

Hafera, Andrias. ***Pembelajaran di Era Serba Otonomi***, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001

Irawan, Prasetya, DR. M.Sc.,*Logika Dan Prosedur Penelitian* Jakarta, STIE LAN PRESS 2000.

<http://www.scis.nova.edu/terrell//doctoral/1998/dete747/cipp.html>

http://www.knowledgebank.irri.org/cglrc/icraf/toolkit/The_CIPP_evaluation_model.htm

Jackson Tarence, Evaluation : Relating training to Busines performance (California : Kogan Page ltd, 1989)

J.Drost, SJ, J Proses Pembelajaran sebagai prose pendidikan(Jakarta,Grasindo, 1999)

Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, *Komunikasi dan Demokrasi* Bandung, PT Remaja Rosdakarya,1991.

Krippendorff,Klause. *Analisis Isi: pengantar Teori dan Metodologi*, Terjemahan

Kelly,A,V *The Curriculum* London: Harper & Row Pub, 1977

Lois Campbell,Qualitatif Reasech (Lmc7 @PSUVM, 2002)

Masrial,*Terus Kuliah Belajar-Mengajar Aktif*, Jakarta: Angkasa Raya,1993.

Miarso,Yusufhadi, Prof, Dr, M.Sc., *Peranan Pendidikan Dalam Era Reformasi*,(Jakarta, 2000)

MvNeil,D,John Curriculum,A comprehensive Introduction (Harper Collinc College Publisher 1996).

Jurnal Teknodik No 8, (Jakarta Pustekom, 1999)

Miarso,Yusufhadi, Prof, Dr, M.Sc., ***Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*** (Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan Pustekkom DIKNAS, Jakarta)

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya , 2000

Munadir, *Ensiklopedia Pendidikan*: Malang UM Press, 2001

Mudjiono, Dimyati, ***Belajar dan Pembelajaran***, Jakarta : Rineka Cipta, 2002

Newman, Isadora dan Carolyn R Benz, *Qualitative –Quantitative Reaserch Methodology* (Illionis: Southern Illionis University Press, 1998)

Poerwadarminto WJS dan Wojowasito, S *Kamus lengkap*, (Bandung : Hasta, 1980),

Soemirat,Soleh,Drs. M.S. ,Ardianto,Elvinaro, Drs. M.Si. *Dasar-Dasar Public Relation* Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Soenarko,Drs.SD.MPA. *Public Relations, pengertian, Fungsi dan Peranannya*, Surabaya:CV.Papyrus, 1997

Subangun, Emmanuel. *Membangun Ilmu Komunikasi dan Sosiologi* Yogyakarta: UNIKA Atma Jaya, 1999.

Suparman, Atwi , Prof . Dr. *Desain Instruksional Program Pengembangan keterampilan dasar Teknik Instruksional (Pekerti)*,Pusat Antar Universitas Untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktifitas Instruksional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan kebudayaan (Jakarta :Universitas Terbuka 1997)

Suharto dan Tata Iryanto, Kamus bahasa Indoensia(Surabaya : Indah, 1996)

Stufflebeam , *Conducting Educational Need Assesment*, Boston : KluwerNyhofPub 1985

Snelbecker,E,Glenn. *Learning Theory,Instructional Theory and Psychoeducation Design*. United State Of America:Library of Congress Cataloging in Publication Data

Tayibnapis,Farida Yusuf, DR. M.Pd., *Evaluasi Program* Jakarta: Rineka Cipta ,2000

Trimo, Soejono, MLS. *Pengembangan Pendidikan*, Bandung: Remadja Karya CV, 1986.

Yin,Robert K. *Studi Kasus: Desain dan Metode*, terjemahan M. Djauzi Mudzakir Jakarta: raja Grafindo Persada, 2002